



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Pertarungan Simbolik dalam Konflik Internal PDI Era Rezim Orde Baru (Studi Sejarah Penyerangan Kantor PDI pada 27 Juli 1996)

Ari Sulistyanto¹, Atwar Bajari², Suwandi Sumartias³, Ari Djuneidi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran

ari_sulistyanto@yahoo.com

Abstract

This research seeks to extend the study of Bourdieu's social practice theory, that symbolic power works through words with no recognition / unconsciousness. However, the existence of capital power owned by dominant actors, it will use other ways than words to construct the political reality as desired. The review will emphasize the dominance of actors in structuring the arena of political conflict in other forms. Taking a case on the internal conflicts of the New Order era PDI, the conflict is understood as a form of political integration by the regime of power in ensuring the status quo position. For the PDI supporters of Megawati, internal conflict was perceived as an engineering of the New Order regime to marginalize it in the political arena. For that they hold resistance. Through the method of historical approach and critical interpretation analysis, it was found that the language instrument as the power to structure reality could not establish the doxa / consensus as the New Order regime desired. Another alternative, and has become the habitus of the New Order regime, namely by doing real violence, or political violence. Namely with the deployment of power by state tools.

Keywords: Editor, Publishing, Manuscript, Book

Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk memperluas kajian dari teori praktek sosial Bourdieu, yaitu kuasa simbolik bekerja melalui kata-kata dengan tanpa dikenali/tanpa disadari. Tetapi, adanya capital power yang dimiliki aktor dominan, maka akan mempergunakan cara lain selain kata-kata untuk mengkonstruksi realitas politik seperti yang diinginkan. Kajian akan menegaskan dominasi aktor dalam menstruktur arena konflik politik dalam bentuk lain. Dengan mengambil kasus pada konflik internal PDI era rezim Orde Baru, maka konflik dipahami sebagai bentuk integrasi politik yang dilakukan rezim kekuasaan dalam menjamin posisi status quo. Bagi PDI pendukung Megawati, konflik internal dipersepsi sebagai rekayasa dari rezim Orba untuk meminggirkannya dalam arena politik. Untuk itu mereka mengadakan perlawanan. Melalui metode pendekatan sejarah dan analisa penafsiran kritis, didapatkan kesimpulan, instrumen bahasa sebagai daya untuk menstruktur realitas tidak sanggup menetapkan doxa/konsensus seperti yang dikehendaki rezim Orde Baru. Alternatif lain, dan sudah menjadi habitus dari rezim Orde Baru, yaitu dengan melakukan kekerasan nyata, atau kekerasan politik. Yaitu dengan pengerahan kekuatan yang dilakukan alat negara.

Kata Kunci: Integrasi, Symbolic Power, Politik kekerasan, Kekerasan politik.

Pendahuluan

Konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1996 merupakan konflik antara PDI Pro Kongres dengan PDI pendukung Megawati. Konflik internal partai politik itu akhirnya berujung pada penyerangan kantor DPP PDI yang kemudian dikenal dengan “peristiwa 27 Juli 1996”. Kendati, peristiwa tersebut merupakan kejadian masa lalu, ada beberapa hal yang menarik dari konflik internal PDI 1996. *Pertama*, pada konflik-konflik sebelumnya, kelompok yang tersingkir biasanya akan tengelam seiring dengan dinamika partai, tetapi dalam konflik ini justru kelompok yang tersingkir berubah menjadi kekuatan oposisi yang mengancam posisi status quo rezim. *Kedua*, keterlibatan akar rumput yang makin meluas. *Ketiga*, ada keterlibatan pihak luar PDI yang memanfaatkan arena konflik untuk mendorong adanya perubahan politik.

Kondisi ini menyebabkan konflik internal adalah arena pertarungan bagi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik untuk memproduksi wacana dalam memperoleh legitimasi politik. Masing-masing aktor berusaha untuk menstruktur arena sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. Dalam konteks Bourdieu, (dalam Ritzer & Goodman:583:2008) arena adalah struktur yang menopang dan mengarahkan strategi yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki posisi ini untuk berupaya, baik individu atau kolektif, mengamankan atau meningkatkan posisi mereka. Aktor yang mapan yang dibekali dengan habitus dan modal yang kuat cenderung menerapkan strategi untuk mempertahankan monopolinya dan menyingkirkan pesaingnya, dan melindungi *doxa*, yaitu tatanan yang mapan yang diproduksi oleh aktor dominan. Tetapi mereka yang tidak dibekali dengan habitus dan modal yang kuat akan menerapkan strategi subversi atau *heterodoxy*. Akibat dari *heterodoxy*, memaksa aktor yang berkuasa atau dominan untuk keluar dan memproduksi wacana defensif atau *orthodoxy*. (dalam Thompson:86:2007)

Legitimasi kekuasaan sebagai arena konflik politik menjelaskan bahwa masing-masing aktor selalu berhadapan secara kontradiktif. Untuk itu penjelasan mengenai praktek simbolik yang dimanifestasikan dalam bentuk bahasa ujaran akan menjelaskan dinamika konflik dalam pertarungan simbolik pada konflik internal PDI. Dengan demikian akan dapat dideskripsikan bahwa aktor politik yang memiliki kekuatan (modal) akan melakukan dominasi dan

manipulasi untuk mempertahankan *status quo*, di satu sisi. Di sisi lain, menjadi perjuangan bagi aktor politik yang terpingirkan untuk mendapatkan legitimasi. Berkaitan dengan hal tersebut, hal yang menarik dikaji dalam penelitian ini adalah, *pertama* bagaimana konflik menjadi arena pertarungan simbolik untuk memperebutkan legitimasi politik? *Kedua*, bagaimana resolusi terhadap penyelesaian konflik internal tersebut?

Ada banyak penelitian terkait dengan tema dan fokus penelitian ini, yang terbagi dalam tiga tema, seperti adanya unsur luar dalam peristiwa 27 Juli 1996, yaitu keterlibatan militer dalam peristiwa tersebut dan merupakan hasil politik konspirasi. (Ikrar Nusa Bakti, 1999, Stefan Eklöf, 1999, 2003, D. Yatman, 2001). Studi yang lain, menjelaskan tentang analisis pemberitaan, khususnya surat kabar tentang peristiwa tersebut. Kecenderungan pemihakan terhadap pemberitaan peristiwa tersebut, bahwa posisi media massa tidaklah netral, terdapat nilai-nilai tertentu yang diemban oleh media massa (Ramon, 2009, Agus Trilaksana, 2015) dengan peran para wartawan sebagai ujung tombaknya (Wijaya, 2016). Sedangkan tema yang berhubungan dengan pendekatan konflik, seperti konflik politik dalam pemilihan lokal di Malaysia.

Hanya sedikit riset yang membahas konflik internal sebagai arena pemroduksian wacana yang dilakukan para aktor yang terlibat. Padahal dengan kajian tersebut akan bisa dilacak habitus dan modal para aktor sehingga terbentuk model *negotiated order* atau konsensus sesuai dengan kepentingan dan latar budaya aktor.

Dalam perspektif teoritis, penelitian ini berusaha untuk memperluas kajian dari teori praktek sosial Bourdieu. Seperti yang dijelaskan, “*symbolic power is the power to make things with words*, kuasa simbolik bekerja melalui kata-kata dengan tanpa dikenali/tanpa disadari. (23:1975) Tetapi, adanya *capital power* yang dimiliki aktor dominan, maka akan mempergunakan cara lain selain kata-kata untuk mengkonstruksi realitas politik seperti yang diinginkan. Kajian akan menegaskan dominasi aktor dalam menstruktur arena konflik politik dalam bentuk lain.

Melalui kajian terhadap konflik internal politik dalam era rezim Orba, penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan bahwa dengan realitas yang dominan dan represif masih ada ruang bagi aktivitas politik untuk mengembangkan kesadaran politik dalam upaya transformasi maupun emansipasi. Pengembangan kebudayaan baru,

bukanlah dominasi dari kelas yang berkuasa, melainkan bisa lahir dari kelompok atau individu yang termarginalkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Dengan pendekatan ini, maka sejarah adalah, *pertama* sumber data (teks dan historis), *kedua*, sejarah sebagai perspektif tertentu, di mana teks dikaitkan dengan konteks sosial tertentu, *ketiga*, sejarah sebagai analisis, yakni cara bagaimana mengungkap konteks dan dibandingkan dengan fakta lainnya. Dalam penelitian rangkaian peristiwa adalah teks untuk ditafsirkan. Dalam upaya penafsiran dan analisa menggunakan hermeneutika kritis dari Jurgen Habermas. Dalam penafsiran kritis terdapat pokok-pokok yang perlu diperhatikan, (Mc Carthy,2013), *pertama*, penafsiran intepretasi harus dikaitkan dengan kritik ideologi, yaitu pemaknaan dengan memperhatikan kondisi empiris yang berkembang pada saat itu, seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik. *Kedua*, analisis sistem social, pemaknaan tidak sekedar pemaknaan secara obyektif (structural) tetapi juga dilakukan dengan secara subyektif (post struktural), *ketiga*, harus digabungkan dengan filsafat sejarah penafsiran diorientasikan pada masa depan dengan memperhatikan masa kini, dan masa lampau.

Pengkajian terhadap pertarungan simbolik ini difokuskan pada ujaran yang dibatasi mulai dari awal munculnya wacana penyelenggaraan kongres sampai pada pasca penyerangan kantor DPP PDI. Pembatasan itu dimaksudkan untuk menghindari bias dari fokus yang diteliti. Dari hasil pengamatan, rentang waktu mulai dari prolog sampai epilog dalam konflik internal PDI, berlangsung antara bulan Juni sampai pertengahan agustus 1996.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tema-tema yang berkembang dalam konflik internal PDI, terdapat wacana dominan dari masing-masing aktor dalam mengkonstruksi realitas politik. Yaitu, legitimasi kongres, referendum dan politik *labeling*. Ketiga wacana dominan tersebut yang menonjol dalam konflik internal PDI sampai pasca penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.

Pada saat menjelang kongres, wacana dominan yang *pertama* muncul adalah mengenai legitimasi kongres. PDI Pro Kongres mengkonstruksi wacana bahwa kongres merupakan inisiatif dari arus bawah dan sesuai dengan AD/ART

Partai. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya dukungan dari berbagai DPC dan DPD PDI yang menginginkan kongres. Sedangkan, PDI pendukung Megawati bahwa keinginan kongres merupakan bentuk rekayasa politik dan menyalahi AD/ART. Di sisi lain, pemerintah rezim Orde Baru mengkonstruksi bahwa keinginan untuk mengadakan kongres sudah sesuai dengan konstitusi partai.

Silang sengketa tentang legitimasi penyelenggaraan kongres akhirnya terjawab dengan adanya kongres IV di Medan. Kendati demikian, persoalan belum selesai, penolakan Megawati terhadap penyelenggaraan kongres mendapat dukungan yang dari massa PDI pendukung Megawati. Bentuk penolakan dilakukan dengan aksi jalanan dan penguasaan kantor DPP PDI.

Wacana dominan yang *kedua* adalah referendum. Pasca kongres dengan terpilihnya Suryadi sebagai Ketua Umum PDI dan Buttu Hutapea sebagai Sekjen. Adanya kepengurusan baru melahirkan wacana dominan tentang referendum. Maksudnya untuk menguji popularitas dukungan antara Suryadi dengan Megawati. "Referendum" sebagai upaya jalan tengah untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di PDI, yaitu PDI pimpinan Suryadi yang merupakan hasil kongres Medan dengan PDI Megawati Sukarnoputri, dengan tegas Jenderal Faisal Tanjung langsung menyatakan bahwa referendum tidak ada dalam AD/ART. (Kompas/3/7/96) Pernyataan Pangab itu menjadi matra terakhir untuk menghentikan polemik seputar referendum. Kalau wacana tersebut bergulir dan menjadi alternatif penyelesaian konflik internal PDI, dikawatirkan Megawati yang akan menjadi pemenang.

Wacana dominan yang ketiga adalah politik *labeling* yang dilakukan rezim Orde Baru. Hal ini akibat dari aktivitas mimbar bebas maupun aksi jalanan terus bergulir yang dianggap sudah mengganggu ketertiban umum. Upaya untuk menghentikan itu yang dilakukan pemerintah Orba adalah dengan melakukan politik *labeling*. *Labeling* adalah penerapan kata-kata ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan. (Nimmo:108:1999) Di Jerman Nazi, misalnya, golongan elite berkuasa sebagai kebijakan memberi label golongan Yahudi dengan "parasite", "binatang pengganggu" dan "baksil" dan dengan demikian menempatkan mereka bukan manusia, melainkan sebagai hama untuk dibasmi. Sinyalemen aktivitas mimbar bebas telah ditunggangi oleh pihak ketiga, bahkan seperti yang

diungkapkan Pangab, Jenderal Faisal Tanjung mengatakan manuver politik yang dilakukan sebagian kelompok masyarakat menunjukkan gejala seperti yang dilakukan gerakan kiri. (AB/19/7/96) Apalagi setelah Suryadi diterima oleh Presiden Soeharto pada tanggal 25 Juli 1996. Dalam pertemuan itu Presiden Soeharto segenap jajaran PDI untuk mewaspadaai adanya “setan gundul”, yakni pihak-pihak tertentu yang anti pemerintah yang melakukan pemboncengan atau menunggangi masalah yang terjadi di PDI.

Bentuk “politik kekerasan” atau sebaliknya “kekerasan politik” menjadi disposisi kongnitif maupun mental pemerintah Orde Baru dalam menentukan aksi sosial terhadap kondisi obyektif yang berlangsung atau menjadi *habitus* dalam mempertahankan legitimasi politiknya. Penerapan salah satu atau keduanya sekaligus tergantung dengan situasi sosial politik yang berkembang. Bentuk-bentuk oposisi memang tidak dikehendaki karena akan dianggap menghambat pembangunan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik serta menimbulkan disintrgrasi nasional.

Faksionalisasi dan Habitus

Faksionalisasi (kubu) yang terjadi dalam tubuh PDI sebelumnya, menjadi kerangka referensi untuk memetakan faksionalisasi dalam konflik internal PDI antara PDI pro kongres dengan PDI Megawati. Kubu PDI pro kongres merupakan kelompok kepentingan yang akomodatif terhadap pemerintah Orde Baru, bahkan kemunculannya merupakan inisiasi dari rezim. Untuk itu dalam

menyebut kubu pro kongres ini disebut dengan “kelompok kooperatif. Sedangkan kubu PDI Megawati Sukarnoputri dengan “kelompok non kooperatif”. Penamaan itu juga mencerminkan *habitus* masing-masing kubu. Selama konflik berlangsung, antara kubu pro kongres dengan pemerintah Orba merupakan dua hal yang berbeda tetapi mempunyai kepentingan yang sama. Berbeda kubu PDI Megawati yang merupakan kelompok non kooperatif untuk selalu tidak sejalan dengan resolusi-resolusi yang ditawarkan pihak kooperatif dan pemerintah.

Melalui tindakan sosialnya Weber menjadi pijakan dalam memahami habitus masing-masing aktor. Weber (dalam Ritzer & Goodman:137:2008) menjelaskan empat tindakan dasar. Yaitu, *pertama*, rasionalitas sarana-bertujuan: tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku obyek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain; harapan-harapan ini digunakan sebagai “syarat” atau “sarana” untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional. *Kedua*, rasionalitas nilai: tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya. *Ketiga*, tindakan afektual: tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor. *Keempat*, tindakan tradisional: tindakan yang sudah lazim dilakukan oleh aktor. Berdasarkan tipologi tindakan dari Weber ini, maka dapat dideskripsikan habitus sebagai berikut:

Tabel 1. Tindakan (Habitus) Aktor

Tipe Tindakan (Habitus)	PDI Pro Kongres	PDI Megawati	Rezim Orde Baru
Rasionalitas sarana-bertujuan	Kongres sebelum Pemilu	Kongres sesudah Pemilu	Penyelesaian sesuai Konstitusi Partai.
Rasionalitas nilai	Kongres menjadi alternative penyelesaian kemelut PDI.	Jalur Hukum.	Menyesuaikan dengan AD/ART Partai.
Tindakan afektual	Aspirasi dari bawah.	Hasil rekayasa.	Aspirasi murni dari partai.
Tindakan tradisional	Kooperatif.	Non Kooperatif.	Politik kekerasan/Kekerasan politik.

Sumber: Olahan penulis

Yang paling menonjol dari tindakan aktor adalah sikap yang non kooperatif yang dilakukan PDI Megawati. Sikap ini dimulai ketika permasalahan DPD Jawa Timur yang tidak kunjung usai karena perbedaan antara DPP PDI dengan Gubernur Jawa Timur tentang Ketua DPD PDI. Dalam hal ini, Megawati tidak ingin terjebak dalam citra “kerangkeng besinya” Weber, yaitu tidak mengikuti struktur yang telah digariskan oleh pemerintah Orde Baru. Sikap ini yang mendorong pemerinyah Orba untuk mengusur Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI melalui kongres.

Dalam pandangan Bourdieu masyarakat sebagai suatu konsep yang terstratifikasi dalam bentuk kelas. Subyek atau aktor menempati ruang sosial bukan karena keanggotaan, melainkan karena kepemilikan modal. Melalui modal menjadi kekuatan dari aktor untuk memproduksi kekuasaan atau mereproduksi ketidaksetaraan, sehingga timbul stratifikasi dalam masyarakat. Posisi aktor tergantung modal yang dikuasai. Bourdieu (dalam Ritzer & Goodman:583:2008) mendefinisikan empat jenis modal, yaitu ekonomi, kultural, sosial dan simbolis. Modal ekonomi merujuk pada kekuatan uang. Modal kultural adalah berbagai jenis pengetahuan yang legitim. Modal sosial adalah hubungan antar orang yang bernilai. Modal simbolis tumbuh dari harga diri dan prestise.

Aspek kapital menjelaskan bahwa selama penyelenggaraan mimbar bebas selama mimbar bebas di dapatkan dari sumbangan yang sifatnya sukarela. Dalam keterangan beberapa narasumber yang diwawancarai, dana operasional untuk kegiatan mimbar bebas didapatkan dari donatur. Selama aksi mimbar bebas berlangsung, memang disediakan kotak amal, dan tiap hari dibuka dan jumlahnya puluhan juta. Aspek lain, seperti dukungan massa. Ketika Megawati Sukarnoputri pidato di mimbar bebas Jl. Imam Bondjol yang searah dengan Jl. Diponegoro ditutup. Hal ini membuktikan bahwa dukungan dan harapan terhadap Megawati untuk membawa perubahan politik cukup besar. Sebelumnya, banyak tokoh oposisi yang melakukan aksi-aksi untuk perubahan, tetapi dukungan tidak

sebesar yang diberikan pada Megawati. Hal ini karena kharisma nama di belakang Megawati, yaitu Sukarno. Nama Sukarno memang menjadi magnet tersendiri dan aksi di Jl. Diponegoro kian hari makin membesar.

Weber (144:2008) menjelaskan tentang otoritas kharismatik, bahwa ketika seorang pemimpin dipisahkan dari orang biasa dan diperlakukan seolah-olah ia memiliki kekuatan atau kualitas supranatural, supra manusia, atau sekurangnya kekuatan yang tidak lazim yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Megawati dengan warisan kharisma dari Sukarno menjadi modal yang berharga dalam menjaga eksistensi ketika otoritas legal dimiliki hilang karena adanya kongres ke IV Medan. Pasca Kongres Medan menjadi pertarungan Megawati dengan otoritas kharismatik melawan otoritas legal yang dimiliki oleh PDI Suryadi.

Untuk menelusuri modalitas yang dimiliki PDI Pro kongres sebenarnya lebih banyak mengandalkan dukungan dari institusi atau aparaturnya rezim Orde Baru yang merupakan hubungan antara *patron-client*. Persoalan perolehan dana pada kelompok pro kongres ini bukan suatu rahasia lagi bahwa dukungan dari rezim sangat besar. Pada tingkat pusat, relasi hubungan pendanaan ditanggung pada institusi pusat, misalnya dengan Sospol ABRI, Dedapgri, atau BIA. Tetapi, di daerah, maka yang bertanggung jawab adalah aparaturnya di bawahnya, seperti Kodim, Ditsospol yang ada di daerah. Bukan rahasia umum lagi, bahwa mereka yang di daerah akomodasi pemberangkatan ditanggung sepenuhnya oleh aparaturnya rezim Orde Baru. Mengenai pembiayaan kongres, misalnya, ketika pertemuan antara kelompok 16 pimpinan Fatimah Achmad dengan Pangab Jenderal Faisal Tanjung pada 5 Juni 1996 di Mabes ABRI, Pangab membantu penyelenggaraan kongres IV Medan sebesar Rp. 800 juta. Berdasarkan keterangan tersebut memberikan penjelasan mengenai relasi modal kapital antara DPP PDI pro kongres dengan rezim Orde Baru.

Dari berbagai kajian terhadap aspek modalitas yang dimiliki masing-masing aktor, dapat dilihat di gambar table berikut;

Tabel 2. Modal Aktor

Modal	PDI Pro Kongres	PDI Megawati Sukarnoputri	Rezim Orde Baru
Kapital	Negara	Gotong royong	Negara
Kultural	Dukungan dari rezim	Dukungan dari massa	Pemegang legitimasi
Sosial	Interaksi dengan rezim	Interaksi dengan massa	Interaksi dengan

		pendukung	semua institusi pemerintah
Simbolis	Otoritas Legal	Otoritas Kharismatik	Otoritas Legal

Sumber: Olahan penulis

Hal yang menarik dari aspek modalitas ini adalah pengaruhnya terhadap arena. Seperti yang dijelaskan Bourdieu (dalam Thompson:144:2009) modal berfungsi, *pertama*, merupakan pertarungan para aktor dalam arena pertarungan yang senantiasa melakukan perjuangan. Kedua, modal merupakan sumber-sumber yang dimobilisasi oleh para aktor untuk mengejar tujuan, yaitu memastikan perbedaan yang menjamin status aktor yang akan menjamin status aktor tersebut dan berfungsi sebagai sumber kekuasaan simbolis. Otoritas legal yang diperoleh kelompok PDI pro kongres secara simbolis menjelaskan bahwa mereka adalah PDI yang syah secara konstitusional karena memang hasil dari kongres. Tetapi, kekuasaan simbolik (*power symbolic*) yang berupa otoritas kharismatik yang dimiliki Megawati Sukarnoputri menjadi pengganggu dan mengancam otoritas legal dari PDI pro kongres.

Dinamika Konflik Internal PDI

Dalam perspektif Bourdieu(69:1992) syarat bekerjanya kekuasaan simbolik adalah, *“partly through the control of other people’s bodies and beliefs that is given by the collectively recognized capacity to act in various ways om deep-rooted linguistic and muscular patterns of behavior, either by neutralizing them or by reactivating them to function mimetically”*.(Bourdieu:69:1992)

Mengikuti pemikiran Bourdieu bahwa pihak yang menjadi obyek sasaran dalam menjalankan aksi atau perilaku merupakan hasil dari kehendak aktor, dan hal ini berlangsung dalam ketidaktahuan atau ketidaksadaran. Bourdieu menyebutnya dengan istilah *misrecognition*. Dengan demikian, timbulah praktek yang disebut dengan *symbolic violence*, yaitu sebagai imposisi/pengenaan oleh aktor sosial dominan atas pemaknaan dan representasi sosial terhadap realitas yang diinternalisasi oleh aktor-aktor lain sebagai hal yang alami dan sah, dan kekerasan simbolik berfungsi melegitimasi struktur dominasi dengan cara merepresentasikan mereka sebagai kondisi alami. (Jackson:145:2009)

Tetapi, hal yang belum disinggung oleh Bourdieu adanya kekerasan nyata untuk memantapkan dominasi aktor terhadap aktor lain. Premis ini berangkat dari asumsi, bahwa ketika

pemikiran ini dikonsepsikan Bourdieu berangkat dari realitas sosial yang terbuka yang menjamin adanya kebebasan untuk saling berkompetisi sesuai dengan kekuatan modal yang dimilikinya. Apabila direlasikan dalam komunikasi politik, adanya kebebasan para subyek/aktor bisa berkehendak untuk menstruktur dan menginternalisasi dunia sosial tanpa ada tekanan dan ketakutan. Pengujian terhadap realitas sosial yang tertutup dan represif belum disinggung dalam pemikiran Bourdieu.

Untuk dalam kajian ini akan dibahas mengenai tindakan aktor dalam memenangkan “arena” ketika kekuasaan simbolik (*symbolic power*) maupun menerapkan *symbolic violence*

tidak mampu menstruktur dunia sosial seperti yang dikehendaki oleh aktor. *Kedua*, konsensus (*doxa*) seperti apa yang terbentuk sebagai akibat dari tindakan aktor, ketika memenangkan “arena”. Merujuk pada konsep “arena” dalam konflik internal PDI, pada awal muncul konflik, “arena” adalah pertarungan untuk memperebutkan legitimasi politik. Tetapi, dalam tahap berikutnya “arena” di satu sisi adalah tempat untuk mengintegrasikan kekuasaan politik, di satu lain sebagai tempat untuk melakukan perubahan kekuasaan politik. Pertarungan antara aktor tersebut akan menghasilkan konsensus atau *doxa*.

Dalam sejarahnya konflik internal PDI tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, dan biasanya konflik dimenangkan oleh kubu kooperatif(moderat) atas kubu non kooperatif (garis keras). Ini karena kubu kooperatif dianggap bisa menjadi perpanjangan tangan rezim untuk menjaga kedudukan *status quo*, dan praktek seperti itu sudah menjadi habitus rezim Orba. Setiap konflik partai justeru menjadi tempat untuk menyaring calon pemimpin partai yang bisa diakomodir dan meminggirkan calon pemimpin partai yang dianggap kritis dan berpotensi mengganggu kedudukan rezim.

Dalam pandangan Bourdieu, konflik internal PDI hakekatnya merupakan pertarungan simbolik, kontestasi antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy*. Dalam pertarungan simbolik itu ada *doxa* yang menaunginya. Sebenarnya, *doxa* merupakan hasil konsensus dari pertarungan antara *heterodoxy* dengan *orthodoxy*, sehingga *doxa* menjadi pemegang dan penentu

kebudayaan sebagai suatu yang obyektif, diterima seperti apa adanya oleh aktor, mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi dominan terbukti dengan sendirinya serta lebih disukai secara universal. Tetapi dalam konteks ini, rezim Orba adalah pemilik dari *doxa* itu sendiri. Melalui habitus dan modal yang dimiliki melakukan kuasa simbolik yang bisa dikonversi menjadi kekerasan simbolik (*symbolic violence*), dan itu terus berlangsung masa pemerintahan.

Dengan demikian, apapun hasil dari pertarungan simbolik, rezim Orba tetap menjadi pengendali agar tetap berada dalam posisi *status quo*. Dalam konteks konflik internal PDI, pernyataan-pernyataan simbolik rezim Orba seperti yang dikatakan Bourdieu sebagai *structure as well as structured*, yaitu menegaskan aturan main yang sesuai dengan ketentuan normatif. Ini terlihat ketika pada saat pra kongres, misalnya, lebih menekankan norma-norma yang universal, seperti “keinginan kongres sudah sesuai dengan aturan konstitusi”, “keinginan kongres tidak melanggar AD/ART, kemudian “menyarankan rekonsiliasi dengan musyawarah mufakat”. Pernyataan yang menstruktur tersebut menjadi justifikasi untuk melakukan konversi simbolik dengan pernyataan bahwa kongres merupakan upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PDI, dan kemudian memberikan ijin penyelenggaraan kongres. Melalui praktik simbolik yang dilakukan, keinginan dari pemerintah rezim Orde Baru bahwa “kongres” adalah *as structured* dalam penyelesaian konflik internal PDI.

Ini berarti persepsi pemerintah terhadap arena (*field*), bahwa konflik PDI merupakan persoalan internal PDI sendiri, dan kepentingan pemerintah adalah sebagai penengah. Namun, dalam perkembangan berikutnya, persepsi terhadap arena konflik pun berbeda, ketika pasca kongres melihat adanya arus dukungan terhadap Megawati semakin membesar dan melibatkan massa di luar PDI, maka persepsi terhadap arena pun juga berubah, yaitu aksi protes yang dilakukan pendukung Megawati sudah ditunggangi dan berkembang ke arah makar.

Pada masa awal konflik, kelompok PDI Pro Kongres sebenarnya berada pada posisi *heterodoxy*, yaitu melakukan antagonisme terhadap kepemimpinan Megawati Sukarnoputri. *Heterodoxy* adalah strategi subversi untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok yang dominan. (Thompson:87:2007) Sedangkan, kepengurusan Megawati yang merupakan hasil Munas PDI 1993 sebenarnya berada dalam sub ordinat dari rezim Orde Baru sehingga berada dalam

posisi *orthodoxy*. Yaitu, strategi konservatif untuk mempertahankan kekuasaannya. Tetapi, dalam prosesnya Megawati berubah posisi yang semula berada dalam wilayah *orthodoxy* menjadi *heterodoxy*. Hal ini bisa dijelaskan, ketika mendengar ada prakarsa kongres yang dilakukan DPD dan DPC PDI. Megawati dengan jajaran pengurus DPP PDI menggelar rapat dan menunjuk Soetardjo Suryoguritno sebagai ketua panitia kongres pada tanggal 3 Juni 1996.

Sikap penolakan terhadap kongres inilah yang mengubah dari *orthodoxy* menjadi *heterodoxy* dan mengkonversi menjadi sikap non-kooperatif terhadap rezim Orba. Kondisi demikian menyebabkan PDI Megawati mempersepsi arena bahwa kongres merupakan hasil rekayasa dari rezim sehingga berbagai upaya simbolik yang dilakukan PDI Pro Kongres ditanggapi dengan penuh perlawanan. Misalnya, dengan menyatakan masa kepengurusan DPP yang dipimpinnya berlaku sampai 1998, mengancam akan membawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan menggugat mereka yang memberi izin kongres, sampai tidak mengakui kepengurusan DPP PDI hasil kongres.

Sedang, PDI Pro Kongres mempersepsi arena bahwa selama kepemimpinan PDI Megawati banyak meninggalkan permasalahan, dan hal ini dibuktikan dari keinginan dari DPD dan DPC untuk segera melaksanakan kongres. Kendati, banyak perlawanan yang datang dari pihak PDI Megawati, kenyataan persiapan kongres tetap berjalan terus. Akhirnya, kongres bisa terlaksana dan terpilih Drs. Suryadi sebagai ketua yang baru PDI periode 1996-1998.

Hal ini yang membedakan konflik internal pada tahun 1996 dengan konflik-konflik sebelumnya adalah pada saat penyelenggaraan kongres selesai dengan terpilihnya kepengurusan baru, maka konflik pun selesai. Ada pihak yang dipinggirkan, dan ada yang dimenangkan. Biasanya yang terpinggirkan akan dengan sendirinya tenggelam seiring dengan dinamika politik yang lebih mengakomodasi pemenang. Tetapi, setelah perhelatan kongres IV Medan selesai, tensi politik justru tambah memanas, dukungan terhadap Megawati bukanlah tambah menyusut, kian hari tambah besar dan meluas. Setiap hari di depan kantor DPP PDI digelar mimbar bebas dan di jalan sekitar Jl, Diponegoro sering digelar aksi-aksi demonstrasi tidak saja mengutuk PDI hasil kongres, tetapi juga mencaci maki pemerintah.

Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan hal tersebut, *pertama*, pemerintah rezim Orde Baru

sudah berkurang legitimasinya, ini ditunjukkan dengan berbagai aksi jalanan sebagai bentuk ungkapan ketidakpuasan terhadap jalannya pemerintah selama ini. Ben Anderson mengatakan, “Pemerintah Orde Baru sudah *sowak*.” Tapi selama 25 tahun belakangan ini, adalah pemerintah yang paling kuat selama sejarah modern Indonesia. Pemerintah Orba itu kuat. Pemerintah Hindia Belanda juga kuat. Selain kuat, buasnya bukan main, melebihi pemerintah Hindia Belanda”. (Suara Independen/2/7/96) *Kedua*, modal simbolis, yaitu kharisma Sukarno yang masih melekat pada pengikutnya dan menjadikan konflik internal menjadi momentum untuk perubahan.

Hilangnya modal otoritas legal yang dimiliki Megawati akibat kongres IV Medan, tidak serta merta menghilangkan modal yang lain. Modal simbolik, yaitu otoritas kharismatik yang kemudian dikonversikan dengan modal sosial dan kapital mengubah peta konflik internal PDI yang semula antara PDI Megawati berhadapan dengan PDI Pro Kongres, berubah menjadi konflik antara PDI Pendukung Megawati yang berupaya untuk *mendeligitimasi* kekuasaan rezim Orde Baru. Sedangkan posisi dari PDI pro Kongres, baik habitus maupun modal sudah menginternalisasi pada kekuasaan rezim Orde Baru.

Kekerasan Politik Sebagai *Negotiated Order*

Berbagai upaya persuasif dari aparat Orde Baru untuk menghentikan kegiatan mimbar yang berlangsung di kantor DPP PDI terus dilakukan. Kenyataannya, aktivitas massa pendukung Megawati bukanlah reda, justru intensitas kegiatan terus meningkat dengan berbagai aksi jalanan yang mereka lakukan. Apalagi aktivitas tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai elemen Ormas maupun LSM yang tergabung dalam Majelis Musyawarah Indonesia (MARI).

Upaya persuasif yang lain adalah dengan menggunakan strategi *labeling*. Bourdieu menyebut sebagai bentuk *distinction*³ dari aktor dominan. Tujuan sentralnya selalu memastikan “perbedaan” yang menjamin status aktor dan berfungsi sebagai sumber kekuasaan simbolis yang kemudian digunakan untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. Bagi Bourdieu, “perbedaan” memberi struktur pada hierarki sosial dan memberi mereka legitimasi dengan mewakili mereka sebagai sesuatu hal yang alami. (Edkins & Williams:142:2010)

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Orba mulai menstruktur realitas dengan mereka yang

terlibat aktif di kegiatan mimbar bebas dan aksi jalanan sudah “ditunggangi” dan mengarah pada tindakan makar. Yang dimaksud dengan “ditunggangi” adalah kegiatan mimbar bebas itu bukan lagi murni dari massa PDI tetapi sudah disusupi oleh pihak luar, yaitu gerakan kiri atau komunisme. Merujuk pada historiografi yang dibangun rezim Orde Baru gerakan komunisme selalu melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan bertindak kejam dalam aksi-aksinya. Oleh karena itu harus dijauhi dan dimusuhi. Ini berarti realitas yang hendak dibangun rezim Orba adalah aktivitas mimbar bebas sama halnya dengan gerakan komunis. Tujuannya membuat “garis demakarsi” bahwa mereka yang berada dalam mimbar bebas adalah musuh bersama yang harus dimusuhi, dan menjadikan legitimasi untuk menempuh cara apapun untuk membasmi. Penegasan “demakarsi” ini, ketika rombongan DPP PDI Pro Kongres mengadakan audiensi dengan presiden Suharto. Dalam kesempatan itu, presiden menyebutkan istilah “setan gundul” penyebutan itu memang ditujukan pada berbagai aktivitas yang dilakukan di mimbar bebas.

Upaya politik yang dilakukan rezim Orba dalam mengintegrasikan seperti itu memang sudah menjadi habitusnya, yaitu dengan politik kekerasan, yang dilakukan dengan kuasa simbolik yang dimiliki untuk memproduksi wacana. “Politik kekerasan” yang dijalankan tidak membuahkan hasil, justru direspon dengan berbagai aksi jalanan yang terus meluas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga merambah ke daerah-daerah. Dengan dalih pengambilan kantor DPP PDI yang dilakukan oleh kelompok PDI Pro Kongres yang dibantu oleh aparat keamanan, rezim Orba melakukan “kekerasan politik” dengan melakukan penyerangan terhadap kantor tersebut. Rentetan dari peristiwa itu adalah adanya kerusuhan di Jakarta. Peristiwa itu yang kemudian dikenal dengan “peristiwa 27 Juli”.

Dalam konteks konflik PDI internal dan kemudian adanya aktivitas mimbar bebas yang dilakukan oleh massa PDI pendukung Megawati, pemerintah Orba sudah melakukan persuasi agar aktivitas tersebut dihentikan. Kenyataannya, hal tersebut tidak mendapat perhatian dari massa PDI pendukung Megawati, justru aktivitas mimbar bebas aktivitas jalanan makin meningkat eskalasinya. Upaya untuk menghentikan hal tersebut, pemerintah Orba menempuh jalan “kekerasan politik”, yaitu melakukan penyerangan ke kantor DPP PDI dengan dalih pengambilalihan kantor. Peristiwa penyerangan yang dilakukan massa pendukung PDI Pro Kongres dan aparat keamanan Orde Baru itu yang kemudian dikenal

dengan “persitiwa 27 Juli. Pasca penyerangan segala aktivitas yang berkaitan dengan mimbar bebas dengan sendirinya berhenti, yang disertai dengan adanya penangkapan-penangkapan terhadap aktor-aktor yang diduga dalang kerusuhan tersebut. Dampak lain dari peristiwa itu adalah berhentinya aktivitas mimbar bebas dan aksi jalanan yang selama beberapa minggu membuat panas rezim Orba.

Kesimpulan

Konflik internal yang berlangsung di PDI merupakan kebijakan integrasi politik yang dilakukan rezim Orde Baru. Integrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin status quo kekuasaan rezim. Langkah yang dilakukan dengan menerapkan politik kekerasan maupun kekerasan politik. Dalam politik kekerasan, rezim Orba dengan kuasa simbolik yang dimiliki dengan cara halus dan tidak disadari menstruktur arena dengan strategi labeling, yaitu melakukan stigmatisasi terhadap oposisi yang berpotensi mengganggu kekuasaannya.

Bagi PDI pendukung Megawati, konflik internal dipersepsi sebagai rekayasa dari rezim Orba untuk meminggirkannya dalam arena politik. Untuk itu mereka mengadakan perlawanan. Dalam konteks komunikasi politik, perlawanan mereka direpresentasikan dalam berbagai bentuk massa aksi, baik dalam aksi mimbar bebas, aksi jalanan maupun aksi publisitas dalam bentuk selebaran.

Ketika, “politik kekerasan” ini tidak menemui kesuksesan, langkah selanjutnya adalah dengan kekerasan politik, yaitu kekerasan nyata untuk meredam oposisi berkembang lebih besar. Yaitu dengan membubarkan kegiatan mimbar bebas dengan dalih pengambilalihan kantor DPP PDI yang masih dikuasai PDI Megawati. Kasus penyerangan kantor, yang kemudian terus berlanjut dengan aksi kerusuhan dan pembakaran yang berlangsung disekitar Jakarta berdampak pada tensi politik menjadi tenang seperti yang diharapkan rezim. Aksi-aksi demonstrasi yang selalu mewarnai jalanan di Jakarta tidak tampak lagi yang kemudian juga diikuti dengan penangkapan-penangkapan yang diduga menjadi dalang kerusuhan tersebut. Dalam batas ini, rezim Orba berhasil mengambil tindakan dan mengendalikan terhadap potensi gangguan yang mengancam eksistensi rezim. Dengan kata lain, *negotiated order* sebagai jalan konsensus model rezim Orde baru telah berhasil dilakukan.

Signifikansi teoritis, Bourdieu menjelaskan, “*symbolic power is the power to make things with*

words. (23:1975) Pernyataan itu memberikan pengertian bahwa dominasi yang dilakukan aktor rezim Orde Baru melalui ucapan atau kata-kata. Berkaitan dengan hal tersebut, konsep *symbolic power* Bourdieu dalam konteks konflik internal PDI mengalami perluasan. Wacanan dominan yang hendak diinternalisasikan aktor Orde Baru kenyataannya mendapatkan resistensi dari massa PDI pendukung Megawati. Instrumen bahasa sebagai daya untuk menstruktur realitas tidak sanggup menetapkan *doxa*/konsensus seperti yang dikehendaki rezim Orde Baru. Alternatif lain, dan sudah menjadi habitus dari rezim Orde Baru, yaitu dengan melakukan kekerasan nyata, atau kekerasan politik. Yaitu dengan pengerahan kekuatan yang dilakukan alat negara.

Dalam konsep *symbolic power* atau *symbolic violence*, Bourdieu hanya menjelaskan bahwa bahasa dalam bentuk kata-kata yang mempunyai daya untuk menstruktur/konstruksi realitas sosial. Hal tersebut bisa dipahami, ketika merumuskan konsep tersebut Bourdieu berpijak pada konteks sosial masyarakat yang relatif terbuka dan menyediakan kompetisi para aktor secara bebas. Keadaan ini tentu berbeda ketika rezim Orde Baru berkuasa, realitas sosial masyarakat yang terbentuk adalah realitas yang hegemonik dan represif, sehingga *doxa*/konsensus yang hendak dicapai bukanlah hasil dari pertarungan yang terbuka, melainkan tetap berada dalam pengendalian rezim. Hal ini karena modalitas yang dimiliki sebagai rezim yang berkuasa.

Daftar Pustaka

- Arendt, Hannah, 1958, *The Human Condition*, The University of Chicago Press.
- , 1965, *On Revolution*, New York, Viking Press.
- Bourdieu, Pierre and Loic J. D. Wacquant, 1992. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Bourdieu, Pierre, 1989. *Social Space and Symbolic Power*. *Sociological Theory*, Vol. 7 (1) Spring: 14-25.
- Bourdieu, Pierre, 1977. *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University Press.
- Creswell, John W., 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, 2nd ed. California: Sage Publications.
- Creswell, John W., 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Fice*

- Approaches, 2nd ed. California: Sage Publications.
- Edkins, Jenny & Vaughan Williams, Nick (2009), *Teori-Teori Kritis*, Yogyakarta: Penerbit Baca
- Habermas, Jurgen, (2012) *Ruang Publik : Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Yogyakarta, Penerbit Kreasi Wacana
- (2006), *Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat, Buku ke satu* , Yogyakarta, Kreasi Wacana
- (2006), *Rasio Dan Rasionalisasi Masyaraka, Buku ke kedua* , Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Mc Nair, Brian, (2004) *An Inntrroduction To Political al Communication*, New York, Routledge
- Ritzer, George, (2005), *Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta, Juxtapose dan Kreasi Wacana
- Wijaya, Sri Herwindya Baskara, Firdastin Ruthnia Yudiningrum. (2016). *Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi Wartawan*. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol 1 (2): 97-101